

# IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN PERAJIN PERAHU PINISI DI KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA

Ahmad Taufik<sup>1</sup>, Jaelan Usman<sup>2</sup>, Abdul Mahsyar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar  
e-mail: ataufik@gmail.com

## *Abstract*

*This study aims to analyze the achievement of the objectives of the capacity building program and the basic abilities of the community and to find out the strategy to implement the capacity and capability improvement of the Pinisi boat crafters through this type of qualitative research. The method used is observation, interview, and documentation. Informants were selected by purposive sampling. The results showed that increasing the capacity and basic abilities of the community in developing knowledge, training, and institutional development had been implemented, but not yet optimal. The development of boat crafters development is controlled and controlled based on local government policy. However, this coaching effort does not have much effect on the effectiveness of small-scale business, especially when viewed from the ability of production and the ability to develop capital. The implementation of capacity building and capability of the Pinisi boat-making industry in Tanah Beru is considered inadequate, the government's attention in accommodating the distribution of production, marketing, and capital does not touch the expectations of small-scale industry players.*

**Key words:** Program Implementation, People's Business, Pinisi Boat Crafters

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pencapaian tujuan program peningkatan kapasitas dan kemampuan dasar masyarakat dan mengetahui strategi pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas para perajin perahu Pinisi melalui jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan kemampuan dasar masyarakat dalam pengembangan pengetahuan, pelatihan, dan pengembangan kelembagaan sudah terlaksana, namun belum optimal. Pembinaan pengembangan perajin perahu dikontrol dan dikendalikan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Namun, usaha pembinaan ini tidak banyak berpengaruh pada efektivitas usaha industri kecil, utamanya jika dilihat dari kemampuan produksi dan kemampuan pengembangan bidang permodalan. Pelaksanaan pembinaan kapasitas dan kapabilitas usaha industri pembuatan perahu Pinisi di Tanah Beru dinilai kurang memadai, perhatian pemerintah dalam mengakomodasi distribusi produksi, pemasaran, dan modal tidak banyak menyentuh harapan pelaku industri kecil.

**Kata kunci:** Implementasi program, Usaha Rakyat, Perajin Perahu Pinisi

## **1. PENDAHULUAN**

Kebijakan pembangunan nasional terangkai dalam tiga arah kebijakan yang saling mendukung. Pertama, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kedua, kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok.

Ketiga, kebijakan khusus yang mencakup upaya-upaya khusus pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menjangkau masyarakat miskin (Sumodiningrat, 2007: 45-48). Selanjutnya, bahwa inti yang terkandung dalam ketiga kebijakan tersebut di atas yaitu kebijakan yang diharapkan adalah kebijakan pembangunan yang lestari, kebijakan yang berpijak pada peningkatan peran serta masyarakat

(partisipasi), produktifitas rakyat dan efisiensi dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan.

Keyakinan itu perlu terus ditingkatkan dan dimasyarakatkan. Namun keyakinan saja tidak cukup, harus ada langkah nyata untuk menterjemahkan dalam implementasinya. pembangunan masyarakat merupakan suatu proses baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kebudayaan masyarakat (komunitas).

Mengintegrasikan berbagai komunitas itu dalam kehidupan bangsa dan memampukan mereka untuk memberikan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan Negara berjalan terpadu didalam proses tersebut. Proses tersebut meliputi elemen dasar: pertama, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki tarap hidup mereka. Sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri. Kedua, bantuan dan pelayanan teknik yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan untuk menolong orang lain, dari pemerintah. Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai program yang dirancang untuk perbaikan proyek khusus terhadap proyek khusus (Ndraha, 1990: 201).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, sebagai salah satu wujud dalam mendukung pengembangan usaha kecil, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pemberdayaan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta berkembang menjadi usaha menengah, meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang

punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional. Sebagai aparat pemerintah khususnya aparat Pembina sesuai dengan kebijakan pembinaan bagi pengusaha industri kecil dan menengah (IKM) yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (2004). Perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan internal dan eksternal, maka perlu memperhatikan paradigma baru sebagai sebagai pegangan dalam pembinaan industri kecil dan menengah yakni, perubahan peran pemerintah dari regulator menjadi fasilitator, perubahan pendekatan pembinaan dari pembinaan yang bersifat protektif kearah pengembangan untuk mampu meningkatkan kemandirian.

Bertitik tolak dari asumsi tersebut, maka keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Daerah, khususnya yang dilakukan oleh dinas-dinas di daerah yang memiliki akses langsung dengan usaha rakyat dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah relevan dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bidang-bidang yang dapat dijadikan indikator dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, misalnya: perkembangan sektor pertanian, perkembangan sektor pertambangan dan energi, perkembangan sektor industri, perkembangan sektor pariwisata. Sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, yang tujuan akhirnya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai potensi daerah dapat dikembangkan seperti pengembangan perajin perahu pinisi di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah memberi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya.

Usaha kecil dan menengah khususnya pembuatan perahu pinisi pada dasarnya telah terdapat cikal bakal yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam memperbaiki ekonomi masyarakat Bontobahari. Industri pembuatan perahu pinisi, dengan ciri khas yang dibuat berdasarkan keterampilan masyarakat setempat tentu banyak melibatkan tenaga kerja yang diambil dari komunitas masyarakat pesisir. Pembuatan perahu pinisi tentu memiliki implikasi pada aktivitas ekonomi masyarakat melalui interaksi sosial ekonomi yang lebih nyata.

Berhasil tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksana, baik organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. Dengan demikian isi dari pada kebijaksanaan pada program yang bermanfaat. Adanya kelompok sasaran, terjadinya jangkauan perubahan terdapat sumber-sumber daya serta adanya pelaksanaan-pelaksanaan program. Hasil akhir dari kegiatan implementasi nantinya dari dampaknya terhadap masyarakat, kelompok individu ataupun tingkat perubahan pada penerimanya.

Mengenai potensi daerah tentu kita harus membuka pikiran kita lebih luas lagi. Jika mungkin selama ini yang lekat dalam pemikiran kita tentang potensi daerah adalah pariwisata, maka kita harus segera merubahnya. Potensi daerah memiliki cakupan yang lebih luas dari pada itu. Potensi daerah juga melingkupi potensi industri, kerajinan dan seni budaya daerah, pertanian dan peternakan hingga sumber daya manusiapun merupakan potensi yang dimiliki sebuah wilayah. Pelaksanaan program usaha rakyat adalah upaya yang

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha masyarakat.

Pengembangan masyarakat pada intinya berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat melalui suatu program peningkatan kesejahteraan mereka dengan melibatkan partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, adanya partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan akan mampu memperbaiki kondisi masyarakat yang miskin dan terbelakang ke arah yang lebih baik.

Usaha rakyat di Tanah Beru di Kecamatan Bontobahari sebagai perajin perahu pinisi adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sangat penting untuk melakukan pendampingan atau peningkatan usahanya, agar potensi daerah ini tetap terjaga keasliannya. Pengrajin perahu pinisi dibuat oleh ahli-ahli perahu yang berasal dari desa Ara dan Tanah Beru di Kabupaten Bulukumba. Kepandaian mereka dalam membuat perahu telah diwariskan secara turun temurun sampai saat sekarang ini. Potensi ekonomi rakyat yang masih sangat sederhana terutama sistem peralatan dan teknik pembuatannya, memerlukan sesuatu penemuan baru dalam menunjang peningkatan usahanya. Dari hal tersebut diharapkan menjadi pangkal terjadinya perubahan sosial dan ekonomi rakyat.

Perahu pinisi sebagai alat transportasi tradisional yang sudah berada pada puncak perkembangan, tentu tidak lepas dari proses masa lalu sebagai bagian dari masa lalu, pinisi menjadi simbol budaya Sulawesi Selatan yang perlu untuk dikaji latar belakang dan asal-usulnya untuk kemudian diamati proses perkembangannya sampai saat ini. perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Hanya saja bahwa upaya mengembangkan atau memberdayakan industri kecil menengah pembuatan perahu pinisi masih dihadapkan pada pada berbagai permasalahan, yaitu:

- a. Masalah kelembagaan, hal ini dicirikan dengan lemahnya kondisi intern pengusaha industri kecil dan menengah itu sendiri antara lain: lemahnya penguasaan teknologi, manajemen yang masih sederhana, lemahnya jaringan orientasi pasar dan sifat ketergantungan yang kuat;
- b. Masalah permodalan, dimana nampak bahwa khusus untuk pengusaha industri kecil dan menengah guna mendapatkan pinjaman modal dari perbankan tidak jelas dan kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan atau persyaratan kredit usaha cenderung sulit dijangkau oleh pengusaha;
- c. Masalah pemasaran, kenyataan menunjukkan bahwa para pengusaha industri kecil dan menengah hanya sebagian kecil yang telah mampu menembus pasar regional, hal ini tentunya disebabkan oleh keterbatasan wawasan bisnis, kurangnya pengetahuan perdagangan, kurang memiliki lokasi pemasaran yang potensial karena telah dikuasai oleh para pemodal yang kuat, mutu produk yang belum stabil; dan
- d. Masalah bahan baku, keterbatasan bahan baku kayu yang cocok dengan pembuatan perahu pinisi sangat sulit, sehingga sebagaimana pengrajin industri pembuatan perahu pinisi dipindahkan di

daerah lain yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, justru merugikan geliat ekonomi masyarakat di kecamatan Bontobahari itu sendiri.

Membahas tentang implementasi kebijakan, Wahab merumuskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan individual atas pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Wahab, 1997).

Wahab (1997) mendefinisikan implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu proyek atau program diberlakukan atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha mengadministrasikannya untuk menimbulkan akibat atau dampak yang nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Program merupakan urusan pertama harus ada demi terlaksananya kegiatan implementasi program. Secara harfiah diartikan sebagai rencana aktifitas atau rencana kegiatan dalam suatu wadah tertentu. *United Nation* mendefinisikan program sebagai, hal yang mengatur aktifitas sosial dengan objek yang khusus, waktu dan tempat yang dibatasi dan selalu terdiri dari suatu hal yang bersangkutan paut pada suatu organisasi atau beberapa organisasi pada hal pengorganisasian dan pelaksanaannya (Bintoro, 1991).

Implementasi program meliputi seperangkat kegiatan yang relatif luas program memperlihatkan:

- a. Langkah utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan
- b. Unit atau anggota organisasi yang bertanggungjawab untuk setiap langkah,
- c. Urutan serta pengaturan waktu dan setiap langkah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi dalam pengertian luas adalah pelaksanaan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa suatu proses interaksi adalah di antara merancang dan menentukan sasaran yang diinginkan (Chema dan Rondinelli dalam Tangklisan, 2005).

Program akan menunjang implementasi, karena dalam program memuat berbagai aspek, yaitu:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai
- b. Adanya kebijakan yang harus diambil dalam mencapai suatu tujuan
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- d. Adanya perkiraan yang dibutuhkan
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan. (Chema dan Rondinelli dalam Tangklisan, 2005).

Menurut Jones 1991 (dalam Waluyo, 2007) program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu; adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberi manfaat kepada masyarakat maka boleh dikatakan program tersebut gagal dilaksanakan.

Berhasil tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksana, baik organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. Dengan demikian isi dari pada kebijaksanaan pada program yang bermanfaat. Adanya kelompok sasaran, terjadinya jangkauan perubahan terdapat sumber-sumber daya serta adanya pelaksanaan-pelaksanaan program. Hasil akhir dari kegiatan implementasi nantinya dari dampaknya terhadap masyarakat,

kelompok individu ataupun tingkat perubahan pada penerimanya.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Adapun jenis penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan dan mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sebagai lokasi pelaksanaan program usaha rakyat pengembangan perajin perahu pinisi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: editing, klasifikasi, tabulasi data, dan intepretasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu; adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberi manfaat kepada masyarakat maka boleh dikatakan program tersebut gagal dilaksanakan, (Jones dalam, Waluyo, 2007).

Berhasil tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksana, baik organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. Dengan demikian isi dari

pada kebijaksanaan pada program yang bermanfaat. Adanya kelompok sasaran, terjadinya jangkauan perubahan terdapat sumber-sumber daya serta adanya pelaksanaan-pelaksanaan program. Hasil akhir dari kegiatan implementasi nantinya dari dampaknya terhadap masyarakat, kelompok individu ataupun tingkat perubahan pada penerimanya.

Pengembangan masyarakat mencakup: 1) program terencana yang difokuskan pada seluruh kebutuhan masyarakat, 2) bantuan teknis, 3) berbagai keahlian yang terintegrasi untuk membantu masyarakat, dan 4) suatu penekanan utama atas *self help* dan partisipasi oleh masyarakat.

Sehubungan dengan teori di atas maka dapat dilihat dari segi pertumbuhan dan perkembangan pemberdayaan dalam industri pembuatan perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bontobahari Kabupaten Bulukumba, yang mengalami pasang surut, terutama dilihat nilai produksi, pemanfaatan tenaga kerja serta nilai produksi, pemanfaatan tenaga kerja serta nilai investasi, bahkan terdapat kecendrungan mengalami penurunan aktifitas yang berarti, padahal bila dicermati dari asumsi-asumsi informan yang diteliti dalam hal pembinaan usaha industri pembuatan perahu pinisi, terutama pada pembinaan iklim usaha dan kelambagaan yang umumnya informan menilai adanya usaha-usaha yang signifikan dilakukan oleh pemerintah, bahkan untuk pembinaan formalisasi dalam bentuk perizinan terus digenjot pemerintah dengan menyediakan berbagai regulasi yang dapat dijangkau masyarakat, meskipun birokrasi yang relatif masih panjang. Oleh sebab itu dari informan yang merupakan orang-orang yang berkaitan dengan industri pembuatan perahu pinisi di Tana Beru sebagian besar diantaranya telah bekerja berdasarkan izin usaha perusahaannya sebagai bentuk respon terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas industri pembuatan perahu Pinisi dalam proses usahanya. Dengan demikian, meskipun

usaha pembinaan yang dilakukan relatif baik namun tidak banyak berpengaruh pada efektifitas pertumbuhan sektor industri pembuatan perahu Pinisi.

Pembinaan iklim berusaha bagi industri kecil umumnya dan khususnya pembuatan perahu pinisi adalah sangat penting artinya, terutama dalam mendorong pertumbuhan dan peranan sektor industri dalam percaturan ekonomi lokal di Kabupaten Bulukumba. Terdapatnya iklim berusaha yang lebih pasti melalui sistem formalisasi dan standarnisasi manajemen usaha, memberikan implikasi positif bagi peningkatan daya saing dan posisi tawar sektor usaha industri perahu pinisi pada kebijakan makro dan mikro ekonomi. Menurut camat Bontobahari Kabupaten Bulukumba bahwa “iklim usaha yang baik, tentu harus dimulai dari ketertiban usaha, tersedia kepastian hukum dalam berusaha serta adanya badan hukum yang mampu menjamin kepercayaan dari lembaga-lembaga mitra usaha yang ada, terutama layanan perbankan untuk modal usaha dan perlindungan tenaga kerja yang dimilikinya.

Pembinaan kelembagaan industri pembuatan perahu pinisi, masih belum maksimal, berdasarkan penilaian informan, namun berkaitan dengan pengembangan sektor usaha industri pembuatan perahu pinisi, terutama terhadap masih banyaknya yang kekurangan jaringan kerja dalam hal pengadaan bahan baku. Demikian pula dari segi kelembagaan internal dalam pengelolaan manajemen usaha, masih relatif sedikit usaha industri pembuatan perahu pinisi yang mampu memperlihatkan struktur manajerial dalam aktivitas usahanya, bahkan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan produksi dan realisasinya, tidak bisa dijelaskan oleh pelaku industri pembuatan perahu pinisi di Tana Beru. Oleh sebab itu berkaitan dengan pembinaan kelembagaan yang dilakukan pemerintah dalam penyuluhan, dinilai pengusaha cukup aktif dilakukan, namun tidak banyak berpengaruh pada

perkembangan kelembagaan usaha industri itu sendiri.

Dari segi pembinaan kapasitas dan kapabilitas usaha, maka nampaknya informan merasakan sentuhan-sentuhan pemerintah dalam hal ini dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba, relatif kurang memadai. Hal ini sejalan dengan perkembangan kapasitas usaha industri kecil yang memang cenderung tidak berkembang secara efektif, bahkan dari sisi permodalan cenderung mengalami penurunan, sementara itu dalam hal kapasitas sumber daya manusia dalam menyerap teknologi informasi untuk daerah produksi masih relatif rendah, belum ada perkembangan yang signifikan dalam hal desain produk-produk hasil industri pembuatan perahu pinisi, bahkan banyak produk-produk industri pembuatan perahu Pinisi tidak lagi diproduksi di Bulukumba, seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan maksud untuk mendekati ketersediaan bahan baku.

Dari segi pemasaran produk menunjukkan bahwa sebagian dari pengusaha IKM di Tana Beru Kecamatan Bontobahari dalam sistem pemasaran produknya hanya menunggu pesanan dari para pedagang lokal atau konsumen lainnya sehingga proses produk tidak berlanjut secara berkesinambungan pemasaran. Pada dasarnya baik informan maupun peneliti memberikan penekanan agar pemerintah daerah melalui instansi terkait harus proaktif di dalam melaksanakan promosi produk, tetapi di dalam aktivitas promosi tersebut harus dominan melibatkan para pengusaha sehingga pengusaha dapat secara langsung memahami transaksi-transaksi dengan pengusaha lainnya yang berminat bekerja sama dalam hal pemasaran.

Efektivitas pembinaan kelembagaan bagi pengusaha industri di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yaitu dalam melakukan pembinaan kelembagaan, terutama membangun sentra-sentra industri kecil adalah relatif

baik, penyuluhan mengenai manajemen usaha, namun tidak mampu mendorong peningkatan efektifitas pengelolaan usaha secara keseluruhan. Ukurannya adalah belum menunjukkan *trend* pertumbuhan usaha industri kecil di Tana Beru Kecamatan Bontobahari, terutama karena ketidakberdayaan pengusaha industri dalam memperoleh bahan baku sesuai harapan.

Model pembinaan kapasitas dan kapabilitas usaha industri pembuatan perahu pinisi di Tana Beru Kecamatan Bontobahari, dinilai informan kurang memadai, karena perhatian pemerintah kurang mengakomodasi distribusi produksi, pemasaran serta modal tidak banyak menyentuh harapan pelaku industri kecil, Oleh sebab itu, justru aspek inilah yang paling berpengaruh terhadap efektifitas usaha industri kecil, yaitu kemampuan modal, pemasaran dan distribusi yang tidak mampu diatasi oleh pelaku industri kecil itu sendiri.

#### 4. KESIMPULAN

- a. Hasil penelitian pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan perajin perahu pinisi, menunjukkan bahwa pemberdayaan dan pembinaan peccpaian tujuan pembinaan pembuatan perahu Pinisi, dinilai baik, dalam arti bahwa perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan dan iklim kepastian usaha dan ketertiban usaha dari industri kecil itu cukup tinggi, bahkan penekanan terhadap pentingnya formalisasi dan standardisasi usaha melalui izin usaha dilakukan secara signifikan, sehingga secara perlahan-lahan semua pelaku industri kecil dapat mengantongi izin usaha, agar mudah dikontrol dan dikendalikan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Namun usaha pembinaan ini tidak banyak berpengaruh pada efektifitas usaha industri kecil, terutama dilihat dari kemampuan produksi dan kemampuan mengembangkan bidang permodalan,

dimana dalam lima tahun terakhir efektivitas usaha industri kecil mengalami fluktuasi yang tajam, bahkan cenderung negatif. Efektivitas pembinaan kelembagaan bagi usaha industri di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yaitu dalam melakukan pembinaan kelembagaan, penyuluhan mengenai manajemen usaha, namun tidak mampu mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan usaha secara keseluruhan. Ukurannya adalah belum menunjukkan trend pertumbuhan usaha industri kecil di Tana Beru Kecamatan Bontobahari, terutama karena ketidak berdayaan pengusaha industri dalam memperoleh bahan baku sesuai harapan.

- b. Strategi pembinaan kapasitas dan kapabilitas usaha industri pembuatan perahu Pinisi di Tana Beru Kecamatan Bontobahari, di nilai informan kurang memenuhi harapan masyarakat, karena perhatian pemerintah dalam mengakomodasi distribusi produksi, pemasaran serta modal, tidak banyak menyentuh harapan pelaku industri kecil, yaitu kemampuan modal, pemasaran, dan distribusi yang tidak mampu diatasi oleh pelaku industri kecil itu sendiri.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu menerapkan kebijakan-kebijakan secara proporsial dalam memberikan peluang kepada industri kecil untuk berkembang, dengan tidak membebani terlalu banyak regulasi-regulasi birokrasi yang tidak perlu.
- d. Perlu adanya perhatian dalam hal pemberdayaan kelembagaan, dengan meningkatkan kemampuan pengusaha industri kecil dalam menerapkan model manajemen usaha yang dapat dikontrol dan dikendalikan secara manajerial.

## 5. REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah, 2004.
- Bintoro, Jokromijojo 1991. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta LP3Es
- Cangara, 1998. *Pengantar Ilmu komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Edward III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Guntur, Setiawan, 2004.. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hill, Michel, 2006, dan Peter Hupe, *Implementing Public Policy*, London: Sage
- Ikhsan dan Salomo. 2002., *Keuangan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT, Rosdakarya
- Kadarisman. 2007, *Pengendalian Mutu pada Industri*, Jakarta: Penerbit Raja grafindo
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996, *Pembangunan untuk Rakyat*, CIDESINDO, Jakarta
- Konkon, Subrata. 1990, *Pembangunan Masyarakat*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Korten,. 2001, *Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Kusnadi, Dkk ,.2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi* . Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Moleong , Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Murtir, Jeddawi., 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. Kencana Prenada Media Group,. Jakarta.
- Murtir, Jeddawi. 2008 “ *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Bina Aksara, Jakarta

- Mustari, Nuryanti, 2013. *Impelementasi Kebijakan Publik, (Pemahaman Teoritis Empiris)*. Cet. Pertama (I) 2013, Penerbit, Membumi Publishing.
- Nakamura, Robert T. and Frank Smallwood, 1980, *the Politics of Policy Implementation*, New York : St.Martin's Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990, *Pengembangan. Masyarakat*. Revisi,Pustaka Pelajar, Yokziduhu yakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003,. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*, Jilid I. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Nugroho, Riant, D. 2004, *Pemberdayaan Masyarakat*, Elex Media Komputerindo, Jakarta
- Nugroho, Riant, D, 2004, *Kebijakan Publik , Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant, D . 2006. *Public Policy*, jakarta,Elex Media Komputindo
- Parker, RS. 1975,. *Policy and Administration, in Public Policy and Administration in Australia: A Reader*, John Wiley and Sons, Sydney: Australia Pty.,LtdDd,.
- Pressman, Jeffrey L. and Aaron Widavsky, *Implementation*, Berkely: University of California Press, 1974.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Rubin dan Rubin, 1992, *.mengidentifikasi 10 (Sepuluh) Fungsi Pemerintah dalam Kaitannya denga Pengembangan Masyarakat*,. jakarta:PT Gramedia.
- Salusu, J. 2002. *Pengambilan Keputusan Stratejik*, (Cet. Ketiga).. Jakarta: Grasindo.
- Siagian 1984,, *.Pengembangan Sumber Daya Insani*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sriwiyanto, 2006, *Implementasi Kebijakan Pembangunan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sumodiningrat, 2007,*Pemberdayaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. Bandung. PT. Rafika Aditama.
- Sutarto, 2006,. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Tangklisan, 2005. *Manejemen Publik*. Jakarta. Grasindo
- Terry, George, R., 1990,. *Prinsip-Prinsip Manejemen*, tej. J. Smith, Jakarta, Bumi Aksara.
- Tjandraningsih, 1996, *Desentralisasi Pemerintahan dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Makalah Simposium, Bappenas, Jakarta.
- Usman, Nurdin 2002. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul., 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara
- Waluyo, 2007 . *Manejemen Publik: Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelakasanaan Otonomi Daerah*. Bandung Bandar Maju
- Widodo, Sutejo Kuwat, “ *Dinamika Kebijakan terhadap Nelayan; Tinjauan Historis pada Nelayang Petani Utara Jawa. 1900-2000*” (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, 17 maret 2007)
- Young dan Quinn 2002 ., *Writing Effective Public Policy Paper: A Guide of Edvisers in Central and Eastern Europe*, Budapest: Local

Government and Public Service  
Reform Initiative, 2002.